IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

disperakim
Provinsi Jawa Tengah

TA.2025-2029

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan : Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan

Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
2. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, keterpaduan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas permukiman dan agraria bagi masyarakat			
	Indikator Tujuan 1.1 : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi : a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta	(Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan dibagi Jumlah Rumah Tangga) dikali 100%

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
		kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.	
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni			
	Indikator Sasaran 1.1.1.1 : Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah penanganan RTLH Miskin dari agregat berbagai sumber pembiayaan	(Jumlah Pengananan RTLH Miskin Tahun N+(N-1) dibagi Jumlah RTLH Miskin baseline Tahun 2024) dikali 100%
			Sisa RTLH 2024
			Target Penanganan per Tahun
			- Pemerintah Pusat dan Baznas/ CSR
			- Pemerintah Provinsi
			- Pemerintah Kabupaten/ Kota
			- Pemerintah Desa
			- Swadaya Masyarakat/ Verivali
	Indikator Sasaran 1.1.1.2: Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat	Jumlah penanganan Backlog Miskin dari agregat berbagai sumber pembiayaan	(Jumlah Pemenuhan Backlog Miskin Tahun N+(N-1) dibagi Jumlah Backlog Miskin baseline Tahun 2024) dikali 100%
			Backlog Kepemilikan 2024
			Target Penanganan per Tahun
			- APBN
			- APBD Provinsi
			- APBD Kabupaten/ Kota

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
			- CSR
			- Pengembang Perumahan
	Indikator Tujuan 1.2 : Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan	Luasan penanganan kawasan permukiman kumuh total (< 10 Ha, 10-15 Ha, dan > 15 Ha) yang tertangani dari agregat berbagai sumber pembiayaan	(Jumlah Luasan Penanganan Kawasan Kumuh Tahun N+(N-1) dibagi Jumlah Total Luasan Kumuh Tahun 2018-2024) dikali 100%
			Total Luasan Kumuh 2018-2024
			Penanganan s.d. 2024
			Sisa Kumuh 2024
			Target Penanganan per Tahun
Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman			
	Indikator Sasaran 1.2.1.1 : Persentase Kawasan Kumuh	Luasan penurunan kawasan permukiman kumuh total (< 10 Ha, 10-15 Ha, dan > 15 Ha) yang tertangani dari agregat berbagai sumber pembiayaan	(Jumlah Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Tahun N+(N-1) dibagi Jumlah Total Luasan Kumuh Tahun 2018-2024) dikali 100%
			Total Luasan Kumuh 2018-2024
			Penanganan s.d. 2024
			Sisa Kumuh 2024
			Target Penurunan per Tahun
	Indikator Tujuan 1.3 : Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah pengajuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (penetapan lokasi) yang difasilitasi	(Jumlah penyelenggaraan pengadaan tanah yang terfasilitasi dibagi Jumlah pengajuan pengadaan tanah) dikali 100%
Sasaran 1.3.1 : Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
	Indikator Sasaran 1.3.1.1 : Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah pengajuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	(Jumlah penyelenggaraan pengadaan tanah yang terfasilitasi dibagi Jumlah pengajuan pengadaan tanah) dikali 100%
	Indikator Tujuan 1.4 : Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	Jumlah pelaksanaan penataan aset dan akses yang difasilitasi	(Jumlah fasilitasi pelaksanaan Reforma Agraria dibagi Hasil Identifikasi Subjek, Objek dan Kebutuhan Akses Reforma Agraria) dikali 100%
Sasaran 1.4.1 : Terlaksananya Reforma Agraria di Jawa Tengah			
	Indikator Sasaran 1.4.1.1 : Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh GTRA	Jumlah penataan aset dan akses yang difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi	(Jumlah fasilitasi pelaksanaan Reforma Agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dibagi Hasil Identifikasi Subjek, Objek dan Kebutuhan Akses Reforma Agraria) dikali 100%

Semarang,
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

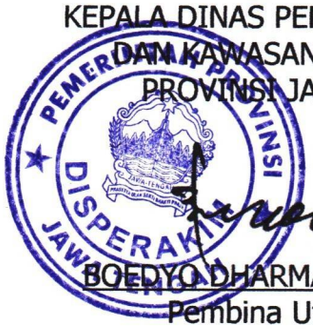

BOEDYO DHARMAWAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003